

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Azhary, Tahir. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : UI-Press, 1995.

Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Maullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Edward III, George C. (edited). *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England, 1984.

Efendi. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Balai Buku Indonesia. Jakarta, 2005.

Gaffar, Afan. *Otonomi Daerah Dalam Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta : UII Press, 2005.

Korten David C dan Syahrir. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1980.

Kusnardi, Moh. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti, 1987.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

M. Hadjon, Philipus, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press, 1994.

M.D. Mahfud. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Muchsan. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.

Nazmil Yunas, Didi. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya, 1992.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ripley, Rendal B and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, Second Edition. The Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986.

Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico, 1986.

Samodra, Wibawa. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Sinar Grafika, 1994.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821)*.

Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6264)*.

C. Artikel/Jurnal

Arief Sidharta, B. *“Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), *“Rule of Law”*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II, November 2004, diakses pada tanggal 21 April 2020.

Fajri, Nurul dan Zainal Abidin, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2 Nomor 2, 2017, diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

Rakayoga, Gusti Lanang. *“Civil Service Discipline Based On The Government Regulation Number 53 Year 2010 Viewed From The Personel Law Aspect In Indonesia.”* Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), 2014, diakses pada tanggal 21 April 2020.

Sabatier, Paul. *“Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research”* Journal of Public Policy 6, (Jan, 1986), pada tanggal 20 April 2020.

Sriastuti, Baiq. *“Kedudukan Tenaga Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”*. Jurnal IUS “Kajian Hukum dan Keadilan”, Volume V, Nomor 2, 2017, diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

Soetiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), diakses pada tanggal 20 April 2020.

D. Internet

Fauzi Yudistira. *Implementasi Kebijakan Publik*”. 2010. <http://www.Scribd.com/doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik>, diakses pada tanggal 25 April 2020.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

<https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi/badan-pengembangan-sumber-daya-manusia-esdm>, Diakses pada tanggal 25 April 2020.

Merdeka, "*Menteri Tjahjo Beberkan Alasan Tenaga Honorer Dihapuskan*",

<https://www.merdeka.com/uang/menteri-tjahjo-beberkan-alasan-tenaga-honorer-dihapuskan.html>, Diakses pada tanggal 20 April 2020.

Wicaksana Dramanda, *Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan*,

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabatpemerintahan/, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.